

Merawat Cagar Budaya

Oleh: Hendra Kurniawan

PENATAAN kawasan Malioboro hingga kini terus dikebut. Sejumlah pekerja masih tampak menata jalur pedestrian yang masih *kinyis-kinyis* karena baru saja dibangun. Pembangunan jalur pedestrian yang bakal memanjakan para pejalan kaki di kawasan Malioboro menjadi salah satu target dalam upaya tata ruang kota Yogyakarta.

Bangunan cagar budaya

Selain upaya penataan Kawasan Malioboro, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan mendata ulang bangunan-bangunan warisan budaya yang ada di wilayahnya. Saat ini tercatat sebanyak 480 bangunan warisan budaya tersebar di berbagai kecamatan. Kemungkinan jumlah ini akan berkurang karena pendataan ulang bertujuan sebagai verifikasi kelayakan bangunan untuk dimasukkan ke dalam daftar warisan cagar budaya.

Tidak sedikit bangunan lama di Yogyakarta yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai warisan budaya. Termasuk di kawasan Malioboro, titik 0 km, dan juga seputaran Tugu Pal Putih yang menjadi *spot-spot* wisata kota. Pengukuhan sebuah bangunan lama menjadi cagar budaya sangat penting karena tidak semua bangunan warisan budaya itu dikelola negara.

Deretan rumah di seputaran Tugu misalnya, ditempati oleh warga dan masih digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bangunan warisan budaya sarat sejarah juga ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sebut saja SMK Negeri 2 Yogyakarta yang menempati bangunan bekas *Princess Juliana School* (PJS). Sementara tetangga dekatnya, SMP Negeri 6 Yogyakarta, sebelumnya merupakan *Hollands Inlandse School* (HIS). Termasuk juga beberapa sekolah lain di kawasan Kotabaru dan beberapa lainnya.

Untuk itu selain memverifikasi kembali, pendataan ulang juga bertujuan untuk meminta persetujuan warga atau pihak-pihak yang menempati bangunan warisan budaya. Persetujuan diperlukan agar warga benar-benar menyadari bahwa bangunan yang ditempatinya termasuk dalam bangunan yang dilindungi. Gerak bersama masyarakat memang sungguh diperlukan demi menjaga dan merawat warisan budaya yang ada.

Upaya Pemkot tentu harus didukung oleh masyarakat. Pemerintah jangan bertindak sendiri tanpa adanya masukan dan pengawasan dari masyarakat. Sebaliknya juga masyarakat perlu diberi pemahaman

yang baik mengenai berbagai kebijakan pemerintah termasuk soal tata ruang. Di Yogyakarta persoalan tata ruang dan pembangunan beberapa kali jadi masalah yang tidak sepele. Sebagai kota budaya, penataan kota Yogyakarta perlu mengindahkan nuansa budaya lokal dan nilai sejarah.

Kasus Pajeksan

Salah satu contoh kesalahan tata kelola ruang yang dapat menjadi pelajaran berharga adalah kasus Pajeksan. Kala itu terjadi pembongkaran bangunan warisan budaya di Jalan Pajeksan Nomor 16 Yogyakarta. Padahal bangunan berarsitektur Tionghoa, Tjan Bian Thiong ini sejak lama telah ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya melalui SK Walikota Yogyakarta Nomor BWB 789/KEP/2009.

Dalam kasus ini, Pemkot Yogyakarta dianggap lalai karena melakukan keteladoran berupa maladministrasi dalam pemberian izin mendirikan bangunan. Merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tindakan mencorat-coret, merusak, atau mengubah bangunan warisan budaya merupakan bentuk pelanggaran undang-undang, apalagi sampai merobohkannya. Sekarang

nasi telah menjadi bubur, namun kejadian serupa tentunya jangan sampai terulang.

Dalam kasus Pajeksan, masyarakat sebenarnya paham kekeliruan itu, namun merasa tidak bisa berbuat banyak karena perizinan dari Pemkot telah keluar. Pengawasan dari masyarakat jelas sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan agar keputusan yang diambil tidak salah jalan. Maka tak hanya pemerintah, masyarakat terutama para pengembang dan investor wajib *melu handarbeni lan hangrungkebi* sehingga tumbuh komitmen tinggi dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada.

Kini bersamaan dengan proyek penataan kawasan Malioboro, kiranya tepat untuk menilik pula keberadaan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada. *Grand design* penataan kawasan Malioboro dan kawasan lainnya kelak jangan semata-mata memenuhi tuntutan modernitas. Selain kenyamanan, aspek budaya lokal dan nilai-nilai sejarah perlu diusung untuk memperkuat keistimewaan. Julukan kota selaksa makna bakal bias manakala Yogyakarta perlahan kehilangan identitas dirinya. **

Hendra Kurniawan, M.Pd.

Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.